



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
Website : [http : //www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id)

NOTA - DINAS

Kepada : Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan Setda Kabupaten
Mojokerto
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Mojokerto
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 027/ JS /416-023/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : LKjIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022

Menindaklanjuti surat dari Saudara Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto Nomor : 342.2/164/416-032/2023 Tanggal 18 Januari 2023 maka bersama ini kami mengirimkan LKjIP pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa .

13
TA
20 12 22
1

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**


YUNI LAILI FAIZAH, S.T.
Pembina
NIP. 19770607 200112 2 005

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**



**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

IKTISAR EKSEKUTIF

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun dasar penyusunan LKjIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur dari Sekretariat Daerah dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini mengacu pada Misi ke tiga Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah”, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan upaya-upaya yang dirumuskan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terbaru.

Adapun capaian kinerja dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 adalah 99% dengan capaian penyerapan anggaran 93%.

Demikian Iktisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto agar kiranya dapat dipahami sebagai gambaran umum dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kabupaten Mojokerto


YUNI DAILI FAIZAH, S.T

Pembina

NIP. 19770607 200112 2 005

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMABAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah	1
1.3 Susunan Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis	5
2.2 Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	7
2.3 Program dan Kegiatan	8
2.4 Rencana Program dan Kegiatan	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	19
BAB IV KESIMPULAN.....	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Komposisi Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2
Tabel 1.2 - Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 2.1 - Strategi dan Kebijakan	7
Tabel 2.2 - Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7
Tabel 2.3 - Program dan Anggaran.....	8
Tabel 2.4 - Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022	9
Tabel 3.1 - Pencapaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	10
Tabel 3.2 - Perbandingan Realisasi Kinerja.....	13
Tabel 3.3 - Pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2022	14
Tabel 3.4 - Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan	14
Tabel 3.5 - Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA	16
Tabel 3.6 - Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Nasional	17
Tabel 3.7 - Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	18
Tabel 3.8 - Alokasi Per Sasaran Pembangunan	19
Tabel 3.9 - Pencapaian Kinerja dan Anggaran	20
Tabel 3.10 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
Tabel 3.11 - Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta alat kontrol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah

Kedudukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem Pemerintahan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai salah satu unsur staf Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

1.3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/505/HK/416-012/2021 tentang Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri 3 (tiga) Sub-Koordinator yaitu:

1. Sub-Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3. Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah aparatur dalam organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 21 orang PNS dan 1 orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

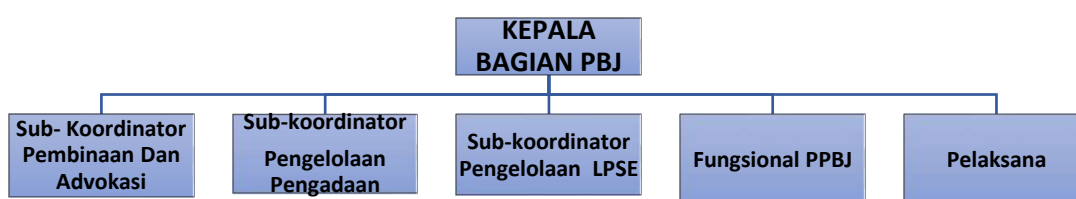
Jumlah Pegawai Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pejabat Eselon III	1
2.	Fungsional PPBJ Muda	6
3.	Fungsional PPBJ Pertama	9
4.	Pelaksana	5
5.	Tenaga Harian Lepas	1
Jumlah		22

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Strata – 2	2
2.	Strata -1	18
3.	Diploma - 3	2
Jumlah		22

b. Struktur Organisasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terdapat tiga Sub-Koordinator. Masing-masing Sub-Koordinator dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Adapun tugas masing-masing Sub-Koordinator dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sub-Koordinator Penglolaan Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. menyusun dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. menyusun perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

2) Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- a. melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- f. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. melakukan pengelolaan informasi kontrak;
- h. melakukan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- i. melakukan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- j. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

3) Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkup pemerintah dan desa;
- f. melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan dan Perjanjian Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui Kebijakan Operasional Strategis, Program dan Kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1. Rencana Strategis

1. Visi

Suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Untuk itu langkah awal yang harus ditempuh adalah penentuan visi, misi dan tujuan organisasi.

Visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Dengan visi diatas, keberadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari Sub-Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub-Koordinator Pengelolaan LPSE dan Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, harus mampu mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan berorientasi pada pencapaian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

2. Misi

Sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengemban Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah”, melalui:

- a. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa kepada Perangkat Daerah, yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- b. Pengelolaan Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- c. Kematangan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang dan Jasa.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi guna mewujudkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam kerangka perencanaan strategik tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Berdasarkan misi ketiga yang diemban Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, maka penjelasan ke dalam tujuan yaitu “Mewujudkan Integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto”, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
2. Terwujudnya standarisasi pengelolaan SPSE;
3. Terwujudnya kematangan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;

b. Sasaran

Sasaran organisasi adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Dengan kata lain, sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan akan memberikan fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan tercapai.

Berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun mendatang periode tahun 2021-2026, ditetapkan sebagai berikut: “Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa”, dengan indikator capaian: “Maturitas Penerapan UKPBJ”.

4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, sebab strategi menetapkan cara untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara tersebut merupakan suatu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, tujuan organisasi secara operasional dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Pengelolaan Proses Pengadaan Berbasis SOP Pengadaan Barang dan Jasa
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Pengelolaan Penggunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa
3	Mengoptimalkan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan SDM yang Mempertimbangkan Peningkatan Kapasitas / Kompetensi SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

2.2. Perjanjian Kinerja Bagian PBJ Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 yang telah disusun diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level 2
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori A

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori A
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	90%
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang berkelanjutan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Inovasi

2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Dengan memperhatikan kinerja spesifik, terukur sebagai standar keberhasilan, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dapat direalisasikan dalam waktu relatif pendek, dan juga untuk mendukung Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dibuat maka Rencana Kegiatan Tahunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dimulai setelah penetapan anggaran Tahun 2022 dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut ini merupakan Program dan Anggaran Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Tabel 2.3
Program dan Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan/ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 385.000.000,00
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 100.000.000,00
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 100.000.000,00
TOTAL ANGGARAN			Rp. 585.000.000,00

Untuk mengukur kinerja Sub Kegiatan tersebut dengan mencermati indikator input berupa anggaran sebesar Rp. 585.000.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan

tujuan untuk menunjang pelaksanaan Proses Pengadaan barang/jasa seluruh OPD yang berbasis LPSE serta pembinaan terhadap pelaku Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

2.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mengacu pada Dokumen Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2
		Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	97%
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	12 bulan
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 peserta

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, dan tujuan perangkat daerah yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategisnya. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Berdasarkan Perencanaan Strategik Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang ditempatkan pada Sub-Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang secara elektronik dan Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi dilakukan penilaian kinerja Tahun 2022, Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil).

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diemban Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang telah disusun dan diuraikan pada Bab sebelumnya, pada Bab ini diuraikan Pencapaian Kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja tersebut. Berikut ini dijelaskan Capaian Kinerja yang telah dicapai oleh Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Bagian PBJ Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi	Maturitas Penerapan Unit	Level 2	Level 2	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kerja Pengadaan Barang dan Jasa			
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori A	77,40 (Kategori BB)	80 %
		Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori A	86,06 (Kategori A)	100 %
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	99 %	99 %
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	90%	93%	100 %
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori Tinggi	82,33* (Kategori Tinggi) <i>*Hasil Penilaian IP ASN 2021 karena IP ASN 2022 masih dalam</i>	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
				<i>proses dan baru akan dirilis di pertengahan tahun 2023</i>	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang berkelanjutan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Inovasi	1 Inovasi	100%

Perbandingan realisasi kinerja disajikan pada tabel 3.2. Data yang digunakan dalam pengisian tabel 3.2 diperoleh dari:

1. Tingkat Maturitas UKPBJ diperoleh dari Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2022 yang terdapat pada Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP.
2. Nilai Reformasi Birokrasi diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah & Bagian di Setda Tahun 2022
3. Nilai SAKIP diperoleh dari:
 - Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor 705/2376/416-060/2022
 - Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 705/1846/416-060/2021
 - Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor X.700.03/99/416-060/2020
4. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh dari Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, Periode Pelaksanaan Triwulan 4.
5. Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh dari Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, Periode Pelaksanaan Triwulan 4.

6. Data Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh dari Listing Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 Pemerintah Kab. Mojokerto.
7. Inovasi yang dihasilkan oleh Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan aplikasi *Vendor Management System (VMS)*.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level 2	Level 2	Level 2 (nilai 4,44)	Level 2 (nilai 35,6)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori A	- <i>*Nilai RB pada tahun ini mengikuti Nilai Sekretariat Daerah</i>	- <i>*Nilai RB pada tahun ini mengikuti Nilai Sekretariat Daerah</i>	77,4 (Kategori BB)
		Nilai SAKIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori A	- <i>*Nilai SAKIP pada tahun ini mengikuti Nilai Sekretariat Daerah</i>	- <i>*Nilai SAKIP pada tahun ini mengikuti Nilai Sekretariat Daerah</i>	86,06 (Kategori A)
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	100%	100%	99%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2020	2021	2022
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	90%	84%	52,4%	93%
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kategori Tinggi	-	82,33 (Kategori Tinggi)	<i>*Nilai IP ASN tahun 2022 belum ada</i>
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang berkelanjutan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Inovasi	-	1 Inovasi	1 Inovasi <i>*pengembangan tahun 2021</i>

3.1.2. Capaian Kegiatan dan Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Pada bagian ini akan diuraikan lebih detail terkait Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2022. Program dan kegiatan tentunya dilaksanakan guna mendukung Pencapaian Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Berikut ini merupakan Pencapaian Kegiatan dan Program pada table 3.3. Data Realisasi dan Capaian yang disajikan pada table 3.3 diperoleh dari Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota, Periode Pelaksanaan Triwulan 4

Tabel 3.3
Pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	97%	99%	100%
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 peserta	100 peserta	100%

Selanjutnya disajikan Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan Bagian PBJ pada tahun 2022 pada tabel 3.4. Data perbandingan realisasi kinerja yang disajikan pada table 3.4 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Th)		
				2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	97%	-	103%	99%
		Jumlah waktu pemenuhan	100%	-	100%	100%

		kebutuhan operasional LPSE				
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	-	100%	100%

Selanjutnya, diuraikan perbandingan Indikator Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 3	Level 2	90%
		Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	97%	97%	100%
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	60 bulan	12 bulan	20%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	500 peserta	100 peserta	20%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional ditampilkan pada tabel 3.6, namun karena tidak ada Data Realisasi Nasional yang dapat diperbandingkan, maka data pada tabel 3.6 diisi (-).

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan UKPBJ	-	-	-
		Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	-	-	-
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	-	-	-
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dalam pencapaian realisasi anggaran maupun pencapaian kinerja dapat dilihat pada bab sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja memenuhi target dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 92,79%. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Treath) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi antar satuan, ketersediaan sarana dan prasarana, komunikasi, transportasi dan peralatan, ketersediaan sumber dana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan adanya pembagian tugas yang jelas antar sub bagian berdasarkan Peraturan Bupati No 73 Tahun 2021, merupakan faktor landasan hukum dalam mendukung kinerja instansi. Dengan dukungan karyawan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto yang berjumlah 21 orang PNS, dan 1 orang THL dengan 2 orang berpendidikan Strata 2, 18 orang berpendidikan Strata 1, 2 orang

berpendidikan Diploma 3, merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

- b. Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk pertengahan tahun 2018 masih banyak item yang harus dipersiapkan, baik dari sisi organisasi, tata laksana, sumber daya manusia dan manajemen. Di sisi lain tugas dan fungsi organisasi harus tetap dijalankan oleh personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang jumlahnya terbatas, dengan kata lain intensitas/beban pekerjaan menjadi lebih besar, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak optimal.
- c. Dengan segala keterbatasan sebagai perangkat daerah yang berada dalam naungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan daerah masih memungkinkan penggunaan anggaran dari bagian lain untuk mendukung operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang salah satu fungsinya adalah “pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa” menjadi momok tersendiri bagi ASN karena banyak kasus hukum yang terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa, dimana pada tahun 2022 ini sudah dapat direalisasikan namun belum optimal.

Beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan/ kegagalan beserta alternatif solusi yang telah dilakukan dijelaskan pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Indikator Kinerja	Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1.	Maturitas Penerapan UKPBJ	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto telah mencapai tingkat kematangan Level 2 pada tahun 2022. • Pemenuhan bukti dukung untuk maturitas Level 3 sudah terpenuhi, namun Level Maturitas Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto belum menjadi Level 3 karena 	Bersurat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia terkait Permohonan Percepatan Proses Verifikasi Bukti Dukung Kematangan UKPBJ level 3 (proaktif)

No.	Indikator Kinerja	Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
		masih menunggu verifikasi oleh LKPP.	
2.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui UKPBJ	Masalah teknis pengupdatean Aplikasi SPSE yang terjadi di tengah proses pemilihan	Update aplikasi SPSE di awal tahun atau akhir tahun
3.	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	Belum memiliki tenaga IT LPSE yang mengelola SPSE	Bersurat ke Bapak Sekretaris Daerah terkait permohonan tenaga IT LPSE
4.	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang jasa	Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman pelaku pengadaan barang / jasa tentang e-katalog lokal	Lebih intensif pembinaan kepada pelaku pengadaan barang / jasa tentang e-katalog lokal

3.2 Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.2.1. Sumber Daya Keuangan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Berikut ini disajikan alokasi anggaran per sasaran Pembangunan pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan UKPBJ	Rp 585.000.000	100%
		Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	Rp 385.000.000	65,8%
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	Rp 100.000.000	17,1%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 100.000.000	17,1%

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%	Rp 585.000.000	Rp 542.793.123	92,78%
		Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	97%	97%	100%	Rp 385.000.000	Rp 365.441.400	95%
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	12 bulan	12 bulan	100%	Rp 100.000.000	Rp 87.426.723	87%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 peserta	100 peserta	100%	Rp 100.000.000	Rp 89.925.000	90%

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Maturitas Penerapan UKPBJ	99%	93%	106%
		Persentase pengadaan yang dihasilkan melalui UKPBJ	97%	95%	103%
		Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	100%	87%	115%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	90%	111%

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Penyerapan Anggaran}} \times 100$$

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	585.000.000	542.793.123	92,79
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	585.000.000	542.793.123	92,79
	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	385.000.000	365.441.400	94,91
	- Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	100.000.000	87.426.723	87,42

	Secara			
	- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000	89.925.000	89,92
TOTAL		585.000.000	542.793.123	92,79

BAB IV KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik dan sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini diharapkan akan menumbuhkan saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksternal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dengan diterbitkannya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang semestinya dengan harapan merupakan sumbangan yang signifikan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD guna kelancaran pekerjaan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan seluruh OPD.
- 3) Dalam menghadapi hambatan terkait keterbatasan jumlah SDM pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka kami akan memaksimalkan dan mengembangkan potensi SDM yang ada dengan mengirimkan personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan-kegiatan pelatihan/bimtek.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Data Tingkat Maturitas Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto

Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kabupaten Mojokerto

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak, Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	2	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ, Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan, Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ, Pembinaan SDM PBJ, Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung



**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)
TAHUN 2022**

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12
337	Kabupaten Gresik	Kabupaten	10.0	4.3	0.0	2.8	4.5	12.9	35.6	69.9	Cukup
338	Kabupaten Bitar	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	5.0	4.8	10.3	40.0	75.1	Baik
339	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	10.0	6.9	0.0	0.0	6.3	13.2	35.6	68.0	Cukup
340	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	9.2	4.8	0.0	4.5	3.9	6.6	35.6	64.5	Cukup
341	Kabupaten Jember	Kabupaten	6.7	4.7	0.0	4.5	2.6	0.0	8.9	27.3	Kurang
342	Kabupaten Kediri	Kabupaten	10.0	4.6	0.0	0.0	3.5	0.0	8.9	26.9	Kurang
343	Kabupaten Lamongan	Kabupaten	10.0	5.0	0.0	4.1	4.2	2.7	26.7	52.6	Cukup
344	Kabupaten Ngawi	Kabupaten	9.3	3.5	0.0	2.7	4.4	13.9	35.6	69.2	Cukup
345	Kabupaten Situbondo	Kabupaten	10.0	4.4	0.0	3.5	4.7	10.7	35.6	68.8	Cukup
346	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	9.4	2.6	0.0	2.7	2.6	4.1	26.7	48.1	Kurang
347	Kabupaten Lumajang	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	3.5	4.2	1.1	8.9	32.5	Kurang
348	Kabupaten Pacurjati	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	3.5	4.8	4.4	35.6	63.1	Cukup
349	Kabupaten Sampang	Kabupaten	10.0	4.3	0.0	0.0	3.8	2.8	4.4	25.3	Kurang
350	Kabupaten Tuban	Kabupaten	10.0	4.9	0.0	5.0	3.1	8.6	26.7	58.2	Cukup
351	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	9.5	4.5	0.0	3.8	2.7	5.5	4.4	30.3	Kurang
352	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	9.9	4.9	0.0	3.2	2.8	2.8	8.9	32.5	Kurang

Lampiran 2 – Sumber Data Nilai Reformasi Birokrasi

DAERAH & BAGIAN di SETDA TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
1	Setda	31.67	52.02	83.69	A
2	RSUD Prof DR. Soekandar	32.67	50.85	83.52	A
3	Bagian Organisasi	30.11	53.21	83.32	A
4	Diskominfo	32.06	51.19	83.25	A
5	BKPSDM	31.15	51.70	82.85	A
6	Inspektorat	31.91	50.72	82.63	A
7	DP2KBP2	32.44	50.18	82.62	A
8	Kec Kemlagi	31.13	51.38	82.51	A
9	Kec Puri	34.11	48.33	82.44	A
10	DLH	32.51	49.75	82.26	A
11	DPMD	33.04	48.68	81.72	A
12	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	29.94	51.74	81.68	A
13	Bapenda	30.81	50.57	81.38	A
14	RSUD RA Basoeni	32.55	48.79	81.34	A
15	Kec Pungging	32.67	48.64	81.31	A

HASIL PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH & BAGIAN DI SETDA TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
16	Dinas Pertanian	32.00	49.30	81.30	A
17	DPMPTSP	33.71	47.42	81.13	A
18	Bagian Adm Pembangunan	30.20	50.04	80.24	A
19	Bagian Kesra	29.55	50.60	80.15	A
20	Kec Dlanggu	28.92	50.10	79.02	BB
21	Bagian Perencanaan dan Keuangan	30.48	48.16	78.64	BB
22	DPRKP2	32.40	45.68	78.08	BB
23	Dinas Pendidikan	27.77	50.20	77.97	BB
24	Bagian PBJ	29.80	47.60	77.40	BB
25	Kec Gedeg	35.21	41.80	77.01	BB
26	BPKAD	30.18	44.82	75.00	BB
27	Dinas Kesehatan	25.73	49.04	74.77	BB
28	Kec Jatirejo	30.31	43.70	74.01	BB
29	Dinas Koperasi dan UM	26.92	46.28	73.20	BB
30	Dinas tenaga Kerja	21.53	50.58	72.11	BB

HASIL PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH & BAGIAN DI SETDA TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
31	DPUPR	25.55	45.74	71.29	BB
32	Bagian Umum	25.70	44.63	70.33	BB
33	Disperindag	34.45	35.33	69.78	B
34	Bappeda	25.54	43.71	69.25	B
35	Dinas Pangan dan Perikanan	30.90	38.35	69.25	B
36	kec Kutorejo	22.90	46.32	69.22	B
37	Kec Pacet	34.76	34.09	68.85	B
38	Bagian Hukum	30.44	38.35	68.79	B
39	Kec Jetis	24.78	43.47	68.25	B
40	Kec Sooko	30.19	37.92	68.11	B
41	Satpol PP	32.59	34.68	67.27	B
42	Bagian Perekonomian	30.75	36.12	66.87	B



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(SAKIP)**

SEKRETARIAT DAERAH

**KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**

NOMOR : 705/1846/416-060/2021

TANGGAL : 9 JULI 2021



INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

JL. RA. BASUNI No. 19C SOOKO MOJOKERTO

Telp. 0321-329188 Fax. 0321-329188



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**



**NOMOR : 705/2376/416-060/2022
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022**

INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Lampiran 4 – Sumber Data Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2022
(Formulir E-81)

Lampiran 5 – Sumber Data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022

Listing Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 Pemerintah Kab. Mojokerto

Kondisi tanggal : 10-06-2022

IP ASN Bagian PBI : **82,33 (Tinggi)**

NO.	NIP	NAMA PNS (TANPA GELAR)	JABATAN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI	PERANGKAT DAERAH	UNIT
1	197808 292001 122002	INDI ILMIAH	Jabatan Struktural	20	40	25	5	90	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2	197211 252001 121005	BAMBANG HARIYONO	Jabatan Struktural	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3	197812 102005 012007	DEASY OCTAVIA	Jabatan Struktural	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	199402 252006 042014	DIANENG MELATI HAFSARI	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
5	197403 272001 171001	HERI KRISTANTO	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
6	199509 232017 082003	KADEK SAPTANITA DWI HENDAYANI	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
7	199407 082017 081002	LADDE MUCHAMAD PIRMIAH	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
8	197808 052010 012008	SRI WULANDARI	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
9	198304 292010 011009	ARIP TRIADI LAKSONO	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
10	197702 262010 012004	IRMA HENDRAYANI	Pelaksana	15	40	25	5	85	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
11	197911 212010 011008	ANDIK ARIYANTO	Pelaksana	10	40	25	5	80	Sedang	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
12	196609 262010 011003	KHAIRUL FKRI	Pelaksana	10	40	25	5	80	Sedang	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
13	197307 042001 122002	PENGAR JULIANI	Jabatan Struktural	15	30	25	5	75	Sedang	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
14	198109 162010 012008	NIEA SHANDRA MAYA	Jabatan Fungsional	20	25	25	5	75	Sedang	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
15	197706 072001 122005	YUMI LAJU FAIZAH	Jabatan Struktural	15	25	25	5	70	Rendah	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
NILAI IP ASN				15,00	37,33	25,00	5,00	82,33	Tinggi		



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

**VENDOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS) PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Nama Inovasi: Vendor Management System (VMS)
2. Tahapan Inovasi: Uji Coba
3. Inisiator: ASN
4. Jenis Inovasi: Digital
5. Bentuk Inovasi Daerah: Pelayanan Publik
6. Urusan Inovasi Daerah: Komunikasi dan Informatika
7. Rancang Bangun:

Untuk memfasilitasi tugas PPK, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa melakukan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/ jasa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Sehingga merubah kegiatan penilaian kinerja penyedia diseluruh aspek pengadaan barang/jasa, baik mengenai data & informasi dan hubungan dengan penyedia barang/jasa yang semula dilakukan dalam bentuk laporan secara tertulis menjadi digital sehingga dapat diakses oleh pelaku pengadaan secara luas.

Data dan informasi penilaian kinerja penyedia barang/jasa yang tersaji dalam Vendor Management System (VMS) telah dikelola sesuai indikator penilaian penyedia pada masing-masing Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:

- a. Penilaian Kinerja Penyedia Barang;
 - b. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi;
 - c. Penilaian Kinerja Penyedia Konsultan Perencana Konstruksi Studi (Planning);
 - d. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi);
 - e. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Lainnya;
 - f. Penilaian Kinerja Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
3. Tujuan Inovasi Daerah:
Untuk memberikan penilaian kinerja penyedia diseluruh aspek pengadaan barang/jasa, baik mengenai data & informasi dan hubungan dengan penyedia barang/jasa. Penilaian ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tanggung jawab Penyedia, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan Barang/jasa, dan meningkatkan kompetensi para Pelaku Usaha dan/atau Penyedia.
 4. Manfaat Yang diperoleh:
Untuk melakukan evaluasi penilaian penyedia yang melakukan kontrak pekerjaan/pengadaan barang/jasa pemerintah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

10. Anggaran: Sumber Anggaran DPA TA. 2021.

11. Hasil Inovasi
Tersedianya aplikasi VMS dan informasi Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang dapat diakses oleh pelaku pengadaan.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

YUNI LAILI FAIZAH, S.T.
Pembina
NIP. 19770607 200112 2 005

SCREENSHOOT VMS

